



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS

PROGRAM STUDI :

TEKNIK FISIKA, TEKNIK ELEKTRO, TEKNIK MESIN DAN FISIKA

Jl. Sawo Manila No. 61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Telp/Fax. (021) 7891753

E-mail : fts@civitas.unas.ac.id, fts@unas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 09/D/FTS/II/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novi Azman, ST., MT.
NID : 0102130822
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik dan Sains
Unit Kerja : Fakultas Teknik dan Sains Universitas Nasional
Alamat : Jl. Sawo Manila, Ps. Minggu, Jakarta Selatan
Telp. 021-7891753

Menerangkan bahwa :

Nama : Agus Wibowo, ST., MT.
NID : 0110090788

telah melaksanakan penelitian dengan judul "**Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Bantuan Sosial Dengan Menggunakan Metodologi Structure System Analyst and Design Method (SDSADM)**" dan melaporkan hasil penelitiannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Februari 2021
Fakultas Teknik dan Sains
Dekan,

Novi Azman, ST., MT.
NID 0301050724

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Prodi Teknik Elektro;
2. Arsip.



UNIVERSITAS NASIONAL PERPUSTAKAAN

Jl. Sawo Manila No. 61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. 7806700 (Hunting), Fax. 7802718-7802719
P.O. Box 4741 Jakarta 12047 <http://www.unas.ac.id> ; Email : info@unas.ac.id
Email Perpus : admin-perpus@unas.ac.id Telp. (021) 788 36933

SURAT KETERANGAN No. : 002/S.Ket.Dos./PUN/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa Laporan Penelitian Mandiri Dosen Fakultas Teknik Dan Sains Universitas Nasional berikut ini telah terdaftar dan menjadi koleksi Perpustakaan Pusat Universitas Nasional.

Adapun Judul tersebut adalah :

NO.	JUDUL	PENULIS
1.	Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Bantuan Sosial dengan Menggunakan Metodologi <i>Structure System Analyst And Design Method</i> (SDSADM)	Agus Wibowo, ST.,MT.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



(Arie Gunawan, S. Kom., MMSi)

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI



Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Bantuan Sosial dengan
Menggunakan Metodologi *Structure System Analysisist and Design Method*
(SDSADM)

Peneliti :

Agus Wibowo, ST., MT.

NIP. 0110090788

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS
UNIVERSITAS NASIONAL
2021

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Bantuan Sosial dengan Menggunakan Metodologi *Structure System Analysisist and Design Method* (SDSADM)
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Agus Wibowo, ST., MT
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 17 April 1972
 - c. NIDN : 0317047202
 - d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - e. Pangkat/Golongan : III B
 - f. Jabatan Struktural : -
 - g. Fakultas/Prodi : Teknik dan Sains/Teknik Elektro
 - h. Alamat Rumah : Jl H. Taya No. 87 Gunuk IVb Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan
 - i. Nomor HP : 081316029876
 - j. Email : agg_wibi@yahoo.com
3. Usulan Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) bulan
4. Usulan Biaya : Rp. 10.300.000,-

Jakarta, 12 Febuari 2021

Mengetahui :

Ka.Prodi Teknik Elektro



Fuad Djauhari, ST, MT

NIP : 0312127501

Dosen Peneliti



Agus Wibowo, M.T

NIP : 0110090788



Menyetujui

Dekan Fakultas Teknik & Sains

Novi Azman, ST, MT

NIP : 0301050724

Abstrak

Program bansos pada masa tanggap darurat Covid-19 diluncurkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menekan jumlah kemiskinan baru akibat banyaknya masyarakat dalam kategori rentan miskin mengalami berbagai persoalan seperti kehilangan pekerjaan, dan pendapatan berkurang karena kebijakan penanggulangan Covid-19. Berbagai persoalan dalam pelaksanaan bansos seperti ketidaksesuaian data penerima manfaat dan waktu penyaluran yang tidak jelas. Belum terintegrasinya data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penggunaan data lama mengakibatkan adanya data ganda penerima bantuan sosial dan tidak tepat sasaran. Akurasi data penerima bantuan sosial yang selalu terus diperbarui (diupdate) menjadi penting dan strategis. Data penerima bantuan sosial adalah data dasar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dengan adanya pembaruan data target penerima bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat (KPM) bisa tercapai sehingga bantuan sosial tepat sasaran, sehingga dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pengembangan sistem yang terintegrasi antara data pemerintah pusat dan daerah serta manajemen resiko yang digunakan oleh pemerintah menjadi strategi penting sehingga pencegahan terhadap permasalahan sistemik dapat tertangani sedini mungkin. Sistem ini dirancang dengan menggunakan metodologi SDSADM/ *Structure System Analysis and Design Method*. Sistem ini berfungsi untuk melakukan verifikasi data secara akurat dan dapat memantau aktifitas kegiatan penyaluran bantuan sosial. Selain itu sistem ini juga dapat mendukung pengawasan kegiatan penyaluran bantuan sosial yang telah dikucurkan pemerintah.

Kata kunci: Bantuan Sosial, DTKS, KPM, Sistem Monitoring, SDSADM

Abstract

The social assistance program during the Covid-19 emergency response was launched as part of the government's efforts to reduce the number of new poverty due to the large number of people in the vulnerable category of poverty experiencing various problems such as job loss and reduced income due to the Covid-19 response policy. Various problems in the implementation of social assistance such as mismatched data on beneficiaries and unclear time for distribution. The absence of data integration between the Central Government and Local Governments and the use of old data resulted in duplicate data on recipients of social assistance and not on target. Accuracy of data on social assistance recipients which is always updated (updated) is important and strategic. Data on social assistance recipients is basic data from the Integrated Social Welfare Data (DTKS) of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. With the updating of data on the target recipients of social assistance for beneficiary families (KPM), it can be achieved so that social assistance is right on target, so that it can help people who really need it. The development of an integrated system between central and regional government data and risk management used by the government is an important strategy so that prevention of systemic problems can be handled as early as possible. This system is designed using the SDSADM / Structure System Analysis and Design Method methodology. This system functions to verify data accurately and can monitor the activities of distributing social assistance. In addition, this system can also support the supervision of social assistance distribution activities that have been disbursed by the government.

Keywords: Social Assistance, DTKS, KPM, Monitoring System, SDSADM

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia atau WHO (*World Health Organization*) menyatakan wabah penyakit akibat virus corona COVID-19 sebagai pandemi global. Status kasus positif di luar China yang akan meningkat tiga belas kali lipat di 114 negara dengan total kematian mencapai kurang lebih 4,291 orang. WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa selama ini belum pernah ada pandemi yang dipicu oleh virus corona dan pada saat yang bersamaan, terjadi pandemi yang belum dapat dikendalikan. Atas dasar itu, maka WHO meminta negara-negara yang terkena dampak dari virus corona COVID -19 untuk mengambil tindakan yang mendesak dan agresif untuk mencegah dan mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini (WHO 2020). Dalam perkembangannya, wabah penyakit COVID-19 yang pertama kali terjadi di Wuhan, China pada Desember 2019, hingga April 2020 telah menyebar hingga ke 210 negara (Worldometers 2020). Dengan karakteristik penyebarannya yang sangat cepat di antara manusia, ditambah dengan mobilitas manusia yang sangat tinggi dan lintas batas negara, menjadikan virus ini menjadi lebih berbahaya. Berdasarkan data dari Worldometer sampai pada 23 April 2020, kasus positif akibat virus ini telah mencapai 2,7 juta di seluruh dunia dimana Amerika Serikat, Spanyol dan Italia menempati tiga peringkat teratas sebagai negara dengan kasus tertinggi di dunia, meninggalkan China yang menjadi tempat awal penyebaran virus ini (Worldometers, *ibid.*, 2020)

Tak hanya dari segi kesehatan, wabah COVID 19 juga berdampak pada sektor lainnya, yaitu sosial dan ekonomi. Seperti pernyataan yang dipaparkan dalam salah satu video yang diunggah di kanal Youtube oleh NasDas Official yang berjudul *Be Careful of The Next 2 Years*, yaitu pernyataan yang mengungkapkan bahwa virus corona COVID-19 tak hilang dimuka bumi setidaknya selama 2 tahun. Hal ini akan berdampak pada kondisi sosial - ekonomi, yaitu bertambahnya tingkat kemiskinan dan banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan. Bertambahnya tingkat kemiskinan dan banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan bisa terjadi di Indonesia berdasarkan pemaparan

studi yang dilakukan oleh Suryahadi et.al (2020). Menurut studi yang dilakukan oleh Suryahadi et.al (2020) memprediksikan tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan meningkat di akhir tahun 2020 sehingga peningkatan tersebut akan menyebabkan sekitar 8 juta penduduk akan mengalami kemiskinan baru akibat wabah ini. Data estimasi ini didapatkan berdasarkan data Sensus Nasional pada bulan Maret dan September 2019. Data tingkat kemiskinan pada tahun 2006 dan 2007 dengan melihat pola yang ada, akan terjadi lonjakan kemiskinan dikarenakan naiknya harga minyak dunia. Prediksi pada akhir tahun nanti tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan mencapai 9,7% yang sebelumnya pada September 2019 mencapai 9,22%. Prediksi peningkatan persentase kemiskinan juga berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi . Pertumbuhan ekonomi jika menurun 1% maka setidaknya akan menambah sekitar 1,4% persentase kemiskinan. Berdasarkan data estimasi sekitar 2,8 juta orang telah kehilangan pekerjaan, dan proyeksi yang ada menunjukkan setidaknya 5,2 juta penduduk lainnya akan kehilangan pekerjaan saat pandemi menyebar. Oleh karena itu pemerintah diharapkan mengambil langkah tegas untuk mengatasi hal ini.

Setidaknya pemerintah sudah merencanakan pencairan dana sebesar 405 triliun rupiah untuk bantuan uang tunai, makanan, bantuan dibidang kesehatan, sosial dan juga pengembangan bisnis. Salah satu contoh kasus dari profesi yang terdampak adalah pengemudi ojek dan angkot dengan penurunan penghasilan sebesar 44%. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak. Di sisi lain, dengan ditutupnya toko dan kantor tentu berdampak pada pihak yang menjual barang dan makanan. Terjadi penurunan pembelian karena orang lebih memilih untuk berbelanja secara online. Oleh karena itu, bisa saja mereka, pihak yang minim pendapatan meninggalkan Jakarta namun mereka beresiko menyebarkan virus ke seluruh Indonesia. (AsiaNewsMonitor,2020). Pemerintah pun akhirnya membuat kebijakan Kartu Pra-Kerja untuk mengadakan pelatihan gratis dengan memprioritaskan bagi 3,7 pengangguran muda umur 18-24 tahun. Jadi pelatihan kerja ini berbasis digital dengan mengadakan kerjasama dengan perusahaan startup digital unicorn di Indonesia seperti Bukalapak, MaubelaJarapa, Pintaria, Ruangguru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker. Hal ini dilakukan karena 90% dari total pencari kerja muda belum

pernah mengikuti pelatihan sertifikasi dengan sebagian besar lulusan SMA. Distribusi kartu pra-kerja diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, daya saing, dan produktivitas mereka ditengah wabah COVID-19 ini. Sehingga diharapkan ini menjadi salah satu solusi mengenai banyaknya pengangguran akibat dari dampak pandemi ini(Asia News Monitor, 2020) .

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat sebanyak 5.047 buruh terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain itu, sebanyak 34.365 pekerja di Jabar diliburkan dan 14.053 orang dirumahkan. Selanjutnya dampak sosial yang dirasakan yaitu kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Kesulitan akses kesehatan yang dirasakan saat ini membuat Ibu hamil tidak diperbolehkan ke Puskesmas karena rawan penyebaran virus penyebab COVID-19. Di sisi lain faktor biaya juga menjadi beban pada saat memeriksa kandungan kebidan atau ginekolog.

PHK yang dialami juga berdampak kepada kesulitan akses kesehatan karena kesulitan ekonomi yang dialami. Tak hanya itu, perempuan mengalami peran ganda, disaat bekerja dirumah perempuan juga sekaligus mengurus anak. Di keadaan pandemi seperti ini juga terjadi ketimpangan gender yang semakin timpang. Menurut Komnas Perempuan, beban yang dialami perempuan berlipat ganda pada perempuan yang berkeluarga dan bekerja. Jadi persoalan pekerjaan rumah tangga dibebankan pada perempuan sekaligus saat perempuan bekerja dirumah yang banyak dikeluhkan saat ini. Sehingga, perlu adanya anjuran budaya yaitu bagaimana sebuah keluarga membagi tugas dan bekerjasama untuk mengelola kehidupan yang harus dirumah (bbc.com,2020). Jadi dapat disimpulkan dampak sosial ekonomi tak hanya seputar peningkatan kemiskinan kibat banyak yang kehilangan pekerjaan, kesulitan akses kesehatan, namun termasuk juga ranah budaya dimana terjadi ketimpangan gender yang semakin timpang yang banyak dikeluhkan oleh pihak perempuan. Di sisi lain, pernyataan di video mengenai dampak seandainya COVID-19 tetap ada selama 2 tahun ada kemungkinan juga dialami Indonesia yaitu dampak kemiskinan dan hilangnya beberapa jenis pekerjaan karena keadaan saat ini pun juga mencerminkan hal tersebut.

Bantuan Sosial merupakan bantuan yang banyak di tunggu dan diharapkan oleh masyarakat yang membutuhkan, Banyak sumber bantuan sosial yang diberikan bisa

pemerintah langsung atau dari organisasi Sosial yang berbadan hukum yang langsung di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (Purnia, 2018), Dinas sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah dibidang kesejahteraan sosial Masyarakat. Pelayanan-pelayanan sosial pada dinas sosial ini juga meliputi Perlindungan sosial, Pemberdayaan Sosial Pakir Miskin, Rehabilitas Sosial, Penyantunan anak yatim dan lanjut usia, pembinaan karang taruna dan pembinaan organisasi sosial. Data yang di ambil dari salah satu situs web Media online Kompas.com (Emerson Yuntho, 2013) mengatakan Pemerintah setiap tahun mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk dana bantuan sosial. Pada periode 2007-2011, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 300,94 triliun untuk tingkat daerah dan pusat. Tahun 2012, alokasi dana bansos sekitar Rp 47 triliun dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 63,4 triliun. Sayangnya, penyaluran dana bantuan sosial (bansos) rawan diselewengkan dan melenceng dari tujuan awalnya, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Pada 2007 Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan adanya realisasi anggaran bansos sebesar Rp 1,015 triliun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pemeriksaan BPK semester I/2010 juga menemukan penyimpangan penggunaan dana bansos di 19 provinsi yang nilainya mencapai Rp 765 miliar. Dana bantuan sosial (bansos) dan hibah rupanya sering disalahgunakan oleh pemerintah daerah (Pemda). Modus penyimpangan dilakukan dengan berbagai cara seperti membuat LSM fiktif, hingga untuk keperluan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim telah menemukan banyak kasus penyelewengan dana bansos dan hibah yang di berbagai daerah. Pola penyelewengan dana yang digunakan pejabat daerah beragam. Terkadang, ada LSM fiktif yang menerima dana tersebut (Fitriyani, 2011). Seperti yang diketahui, saat ini Indonesia memiliki sejumlah program bantuan sosial. Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk rakyat sejahtera (Rastra), Program Indonesia Pintar dan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Banyak riset yang menyoroti besarnya nilai penyaluran bansos yang tidak memberikan manfaat sesuai dengan yang dijanjikan kepada masyarakat. Sejumlah bansos juga dinilai tidak tepat waktu dan sasaran karena diberikan terlalu dini atau justru terlambat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia diharapkan dapat membenahi penyaluran bansos. Pemerintah juga

disarankan memilih penerima manfaat berdasarkan database bersama, termasuk menyiapkan pemutakhiran data dua arah antara database dan data penerima Rastra. Saran lain, pemerintah perlu mengevaluasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tujuannya adalah untuk memastikan tepat sasaran para penerimanya. Ketepatan sasaran menjadi problem utama penyaluran bansos. Sebab belum seluruh instansi pelaksana penyalur Bansos memakai basis data terpadu. Penggunaan basis data terpadu penyaluran Bansos bakal berefek positif. Penggunaan satu data akan membuat program lebih tepat sasaran. Dalam beberapa contoh kasus, ada beberapa calon penerima bantuan sosial tidak dapat menerima hak mereka lantaran ketidakcocokan data. Dalam kasus lainnya, masalah pencatatan ganda juga kerap membuat penyaluran bantuan menjadi tertunda. Pada beberapa kasus yang terjadi menunjukkan sering terjadi penyalahgunaan dana baik dana dari masyarakat ataupun dana dari pemerintah sehingga menyebabkan ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemberian bantuan sosial.

1.2 Langkah Teoritis

Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis tentang kegiatan penyaluran bantuan sosial banyak dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Setelah melakukan analisis suatu kegiatan penyaluran bantuan sosial, dilakukan pengembangan sebuah sistem media informasi monitoring kegiatan penyaluran bantuan sosial dalam bentuk sebuah sistem aplikasi. Pengembangan media informasi monitoring kegiatan penyaluran bantuan sosial bertujuan untuk mencapai hasil yang optimum dari suatu program kegiatan penyaluran bantuan sosial yang akuntabilitas dan transparan.

1.3 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa masalah yang dirumuskan, yaitu :

1. Sebuah aplikasi Monitoring Bantuan Sosial.
2. Sebuah aplikasi yang dapat melakukan monitoring kegiatan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan transparan.

1.4 Keutamaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka keutamaan dari penelitian ini adalah sebuah Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial di Masa Pandemi virus corona COVID - 19 dengan fitur penyaluran tepat Sasaran, fitur pelayanan yang transparan, data yang tidak tumpang tindih dan akuntabilitas.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *State of The Art*

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu model sistem aplikasi monitoring penyaluran bantuan sosial, yaitu model sistem aplikasi monitoring penyaluran bantuan sosial yang dikhususkan untuk melakukan pengawasab kegiatan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengembangkan dan/atau membangun sistem aplikasi monitoring yang dapat melakukan pengawasan terhadap proses kegiatan penyaluran bantuan sosial. Mengingat data penelitian ini berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitain berbasis *The Structure System Analysist and Design Method (SSADM)*.

2.2 Analisis

Menurut Jogianto HM, analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2.3 Sistem

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Sistem dianalogikan sebagai sebuah rangkaian yang saling kait mengkait antar beberapa bagian sampai kepada bagian yang paling kecil, bila suatu bagian atau sub bagian terganggu maka bagian yang lain juga ikut merasakan ketergangguan tersebut.

2.3.1 Sistem Informasi

Masih bersumber dari sumber yang sama dengan analisis dan sistem pada sub bab sebelumnya, Sistem Informasi adalah suatu sistem pekerjaan tertentu yang menggunakan teknologi informasi untuk menangkap, mengirim, menyimpan, mendapat kembali, memanipulasi atau memperlihatkan informasi, dengan demikian dapat mendukung satu atau lebih sistem bekerja.

2.3.2 Perancangan

Perancangan merupakan alternatif pemecahan masalah – masalah yang ditemukan pada saat tahapan analisis. Selain itu, menurut Azhar Susanto (2004) menyatakan bahwa perancangan merupakan spesifikasi umum dan terperinci dari pemecahan masalah yang berbasis komputer selama tahap analisis.

2.3.3 Perancangan Sistem Informasi

Suatu tahapan kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam merancang atau membuat sistem sebelum sistem dibuat dengan tujuan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dalam memecahkan atau dengan kebutuhan pengguna berkaitan dengan pengolahan, pengelolaan dan perolehan informasi yang diinginkan. Perancangan sistem informasi terdiri dari penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi.

2.4 Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan adalah dihasilkannya suatu model sistem untuk merepresentasikan entitas yang akan dibangun. Selain itu, menurut Mastow tujuan dari perancangan adalah untuk membentuk sistem perangkat lunak yang memenuhi kriteria – kriteria utama. Kriteria – kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi spesifikasi fungsional.

2. Memenuhi batasan –batasan media target implementasi.
3. Memenuhi kebutuhan –kebutuhan implisit dan eksplisit berdasarkan kinerja dan penggunaan sumber daya.
4. Memenuhi kebutuhan –kebutuhan implisit dan eksplisit berdasarkan bentuk hasil rancangan yang dikehendaki.
5. Memenuhi keterbatasan –keterbatasan proses perancangan seperti waktu, biaya dan lain –lain.
6. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangbangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli teknik lainnya yang terlibat.
7. Untuk tercapainya pemenuhan kebutuhan berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi sasaran pengembangan sistem.
8. Untuk memudahkan dalam proses pembuatan perangkat lunak dan kontrol dalam mengembangkan sistem yang dibangun.
9. Untuk dapat mengetahui berbagai elemen spesifik pendukung dalam pengembangan sistem baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan pada sistem yang dirancang.

2.5 Definisi Miskin

Menurut Dr. Muslim Kasim kaum miskin adalah antagonisme di dalam kelas buruh. kelas buruh mematok “kerja” sebagai kerja upahan dan mengecualikan mereka yang miskin, penganggur, atau tunawisma. Berbeda dengan “Fakir”, Miskin, ialah keadaan dimana seseorang masih memiliki penghasilan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Kebutuhan – kebutuhan yang wajib terpenuhi ialah sandang, pangan dan papan atau dalam artian lain menyebutkan sebagai kebutuhan primere. Yang meliputi, pakaian (sandang), makanan dan minuman (pangan) dan pemukiman/ rumah (papan).Selain itu keadaan miskin adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya guna menunjang kualitas hidup dan derajat di mata publik.Kebutuhan tersebut seperti, pendidikan, kesehatan dan

pekerjaan yang layak. Masyarakat miskin secara umum ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (*powerlessness*) dalam hal:

1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (basic need deprivation)
2. Melakukan kegiatan usaha produktif (unproductiveness).
3. Menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi (inaccessibility).
4. Menentukan nasibnya diri sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (vulnerability);
5. Membebaskan diri dari mental budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*).

2.5.1 Definisi Kemiskinan

Menurut Para Ahli berikut adalah beberapa definisi dan arti dari kemiskinan menurut beberapa ahli dibidang ekonomi serta bidang –bidang lainnya.

1. Menurut Levitan (1996), kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Karena standar hidup itu berbeda –beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang dapat diterima secara universal.
2. Menurut Schiller (1999), kemiskinan adalah ketidakanggapan untuk mendapatkan barang –barang dan pelayanan–pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan –kebutuhan sosial yang terbatas.
3. Menurut Friedmann (1997), kemiskinan adalah ketidaksamaan memperoleh kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tak terbatas pada :) modal yang produktif atau aset (misalnya tanah, perumahan peralatan dan kesehatan dan lain -lain), sumber –sumber keuangan (Income dan kredit yang memadai), organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (partai politik, sindikat, koperasi dan lain -lain), network atau jaringan sosial untuk memperoleh

pekerjaan barang-barang dan lain –lain, pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna bagi kemajuan hidup.

2.5.2 Definisi Kemiskinan

Menurut Lembaga –Lembaga Berikut adalah beberapa definisi dan arti dari kemiskinan menurut beberapa lembaga yang mengurus dan berkecimpung tentang urusan kemiskinan.

1. Menurut Badan Pusat Statistik, menetapkan garis kemiskinan berdasarkan tingkat kecukupan konsumsi kalori yaitu 2.100 kalori per kapita per hari. Suatu keluarga digolongkan sangat miskin jika pendapatannya hanya mampu memenuhi kebutuhan minimum kalori yang ditetapkan, sedangkan bila pendapatannya selain mampu mencukupi kebutuhan kalornya juga mampu memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti perumahan, air, sandang, dan pendidikan digolongkan sebagai keluarga miskin.
2. Menurut Bank Dunia penetapan ukuran garis kemiskinan untuk Indonesia berdasarkan pendapatan perkapita. Penduduk yang pendapatan perkapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional termasuk dalam kategori miskin. Secara umum Bank Dunia menetapkan garis batas kemiskinan suatu negara memiliki pendapatan perkapita US\$ 1 perhari, bagi negara-negara berkembang US\$ 2 – 4 dan bagi negara-negara maju memiliki pendapatan perkapita diatas US\$ 5 perhari (Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sekitar Rp 12.500).

2.6 Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Drs. Kasim Muslim dalam bukunya yang berjudul Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya menyebutkan beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1. Terbatasnya kesempatan kerja.
2. Terbatasnya akses terhadap faktor produksi
3. Rendahnya kepemilikan aset

4. Kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan
5. Kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan
6. Terhambatnya mobilitas dan kurangnya partisipasi

2.7 Ekonomi

Ekonomi adalah suatu hukum kerja manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup secara materil. Kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga/ rumah tangga dan nomos yang artinya aturan atau hukum. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia dibagi menjadi 3 bagian.

1. Kebutuhan Primer

Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dimiliki oleh setiap insan manusia untuk dapat hidup. Jika kebutuhan primer tidak dapat terpenuhi, maka manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya dengan sepiantasnya bahkan dapat digolongkan sebagai manusia yang fakir. Terdapat tiga kebutuhan primer, antara lain :

a. Sandang

Yaitu kebutuhan pakaian yang sudah semestinya manusia miliki untuk dapat menutup tubuhnya dari cuaca, makhluk hidup lain dan gangguan lain terhadap tubuh manusia.

b. Pangan

Yaitu kebutuhan makanan untuk memenuhi lapar dan dahaga manusia.

c. Papan

Yaitu kebutuhan akan tempat tinggal . Yakni tempat berlindung dari panas maupun hujan.

2. Kebutuhan Sekunder

adalah kebutuhan yang sifatnya melengkapi kebutuhan primer dan kebutuhan ini baru terpenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini bukan berarti tidak penting, karena sebagai manusia yang berbudaya, yang hidup bermasyarakat sangat memerlukan berbagai hal lain yang lebih luas dan

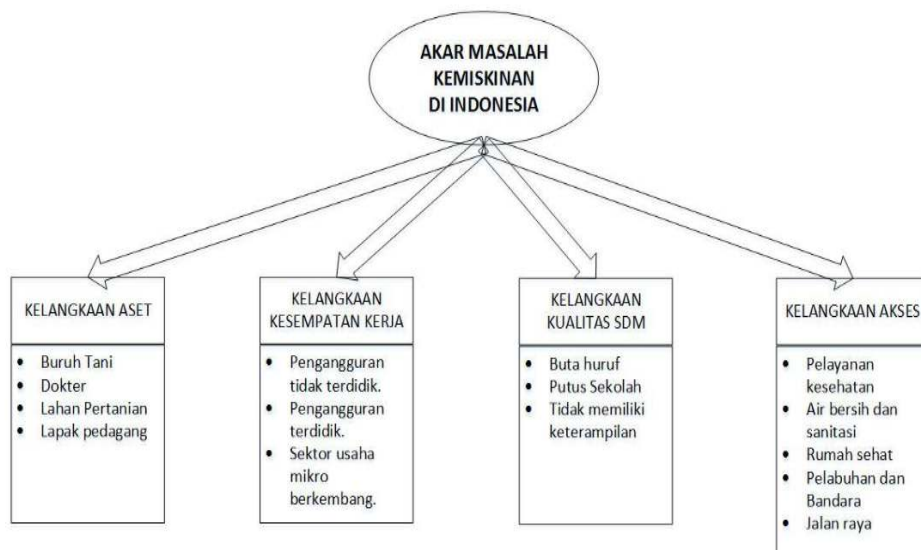
sempurna, baik mengenai mutu, jumlah, dan jenisnya. Contoh kebutuhan sekunder antara lain televisi, kulkas, sepeda motor, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang mendukung kebutuhan primer.

3. Kebutuhan Tersier

timbul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Pada umumnya, kebutuhan tersier ini disebut kebutuhan mewah, karena pemenuhan kebutuhannya tertuju pada barang-barang mewah yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya perhiasan berlian, rumah mewah, mobil mewah, dan lain-lain. Apabila seseorang dapat memenuhi kebutuhan tersiernya, maka dapat meningkatkan status sosial (prestise)nya di masyarakat.

2.8 Akar Masalah Kemiskinan Di Indonesia

Menurut Drs. H. Muslim Kasim, mengatakan dalam bukunya yang berjudul Karakteristik Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya bahwa akar masalah kemiskinan di Indonesia terbagi ke dalam 4 faktor utama, yakni Kelangkaan aset, Kelangkaan kesempatan kerja, kelangkaan kualitas SDM dan Kelangkaan akses. Hal ini dapat deskripsikan dengan gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1. Faktor penyebab kemiskinan

pada gambar 2.1 menjelaskan mengenai akar masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Antara lain:

1. Rendahnya Kepemilikan Aset

Yang dimaksud dengan kelangkaan aset ialah keadaan dimana kurangnya media, lahan dan tenaga kerja yang menjadi aset bagi keberlangsungan hidup masyarakat untuk memperoleh mata pencaharian. Seperti, buruh tani (sebagai tenaga kerja), lahan perkebunan dan lahan pertanian. Selain itu, rendahnya kepemilikan aset ini dapat berupa lahan pertanian, lapak para pedagang untuk berjualan dan sumber daya alam yang dimiliki. Semakin tinggi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara, maka akan semakin tinggi pula pendapatan negara tersebut asalkan negara pemilik aset tersebut dapat mengolah sumber daya alam itu dengan baik.

2. Kelangkaan Kesempatan Kerja

Yakni keadaan dimana terjadinya krisis lapangan pekerjaan sehingga membuat masyarakat pencari kerja mengalami kemiskinan ekonomi. Terjadinya krisis lapangan pekerjaan disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti tidak berkembangnya usaha mikro dan penyerapan bantuan sosial pengentasan kemiskinan dengan baik. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha serta rendahnya masyarakat miskin dalam berproduksi merupakan isu strategis dalam penanggulangan kemiskinan.

3. Kelangkaan Kualitas SDM

Keadaan dimana sektor –sektor lapangan pekerjaan dapat terbuka secara luas namun membutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni untuk dapat menciptakan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

4. Keterbatasan Akses

Minimnya akses jalur penghubung antara satu daerah dengan daerah lain sehingga dapat menimbulkan terjadinya terisolasinya suatu daerah sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada daerah yang terisolir tersebut menjadi miskin. Seperti, tidak adanya akses jalan penghubung, terpencilnya suatu daerah,

tidak tersedianya landasan udara maupun helipad untuk transportasi udara dan tidak adanya dermaga maupun pelabuhan pada pulau – pulau terpencil. Selain itu, keterbatasan dan sulitnya akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan serta kantor – kantor administrasi pemerintahan akan semakin menambah sulit masyarakat miskin untuk menuju penghidupan yang layak. Hal ini disebabkan indikator tersebut merupakan point utama dalam kebutuhan hidup manusia.

Berdasarkan faktor –faktor yang menjadi akar masalah kemiskinan, sebagai tindak lanjut maka dilakukan identifikasi permasalahan. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui penyebab dan akar masalah tersebut berasal. Setelah mengetahui penyebab dan akar masalah, maka mudah untuk menentukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah.

2.9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Program Perlindungan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial. Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lain yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40%

penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya dengan menggunakan Metode Proxy-Mean Testing (PMT). Oleh karena perhitungan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencakup tingkat kesejahteraan secara nasional maka sebaran persentase penduduk 40% tersebut tidak sama atau bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Ada daerah yang pas 40 %, ada dibawah 40% dan ada di atas 40%. misalnya jumlah penduduk 40% terbawah untuk Provinsi DKI Jakarta secara nasional hanya sekitar 11% sementara untuk Provinsi Papua sekitar 75%. Perbedaan yang mencolok tersebut terjadi karena tingkat Kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.

Contoh kasus pada daerah Kabupaten Sinjai adalah berada di bawah 40%, yaitu hanya 37,97 % yang berarti tingkat kesejahteraan masyarakat Sinjai masih lebih tinggi dibanding dengan tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat secara nasional. Rumah tangga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut DESIL. Desil adalah kelompok per-sepuluhannya yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga.

Pengelompokan Desil rumah tangga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

1. Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1- 10 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional.
2. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11- 20 % dihitung secara nasional.
3. Desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21- 30 % dihitung secara nasional.
4. Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31- 40 % dihitung secara nasional.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3, dan Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan mulai dari yang paling terendah.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hanya berisikan 40% rumah tangga karena cakupan 40% dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan penargetan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Cakupan 40% juga meliputi kelompok penduduk miskin dan hampir miskin. Sedangkan rumah tangga yang berada pada kelompok 40% ke atas sudah dianggap mapan dan sudah mampu memberdayakan dirinya sendiri. Adapun jumlah Rumah tangga Kabupaten Sinjai yang masuk dalam Desil 1 sampai Desil 4 di hitung secara nasional adalah :

Tabel 2.1 Tabel Desil pada wilayah kabupaten Sinjai

KECAMATAN	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	JUMLAH
BULUPODDO	647	830	220	417	2.114
PULAU SEMBILAN	524	305	53	126	1.008
SINJAI BARAT	972	1.566	449	781	3.768
SINJAI BORONG	1.069	960	191	505	2.725
SINJAI SELATAN	952	1.157	283	782	3.174
SINJAI TENGAH	1.297	1.486	358	861	4.002
SINJAI TIMUR	1.146	1.310	286	685	3.427
SINJAI UTARA	392	511	185	569	1.657
TELLULIMPOE	1.029	1.531	435	954	3.949
JUMLAH	8.028	9.656	2.460	5.680	25.824

Sumber data dasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2011 yang beberapa kali diperbaharui dan terakhir pada tahun 2015.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada awalnya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Namun pada tahun 2017 diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN-KESOS) Kementerian Sosial.

Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa data terpadu yang telah ditetapkan oleh menteri

merupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah berbasis Rumah Tangga namun pengalokasian program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan. Adapun bantuan sosial dan pemberdayaan yang berbasis keluarga diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan. Sedangkan yang berbasis perorangan diantaranya adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar serta bantuan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program bantuan kepada keluarga sangat miskin (desil 1) dengan bersyarat: memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan /atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Jika terdapat dalam keluarga tersebut orang tua jompo dan penyandang disabilitas. Walaupun dalam suatu keluarga secara nyata tergolong miskin dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi tidak memenuhi minimal salah satu syarat tersebut maka tidak berhak menjadi sasaran penerima bantuan PKH.

Demikian pula untuk Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang dulunya disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) prinsip dasar penetapan sarannya adalah diprioritaskan kepada keluarga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada pada desil 1 dalam hal ini adalah seluruh penerima bantuan PKH dan jika kuotanya melebihi jumlah penerima PKH maka akan diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam DTKS di luar penerima PKH.

Namun demikian, khusus BSP perluasan, sasaran penerimanya adalah keluarga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi yang belum pernah menerima bantuan sosial jenis apapun karena program BSP perluasan adalah secara khusus diluncurkan untuk penanganan dampak ekonomi dari Pandemi Covid-19.

Jumlah DTKS Kabupaten Sinjai saat ini adalah 25.824 RT atau 30.516 KK setara dengan 101.445 jiwa. Jumlah tersebut merupakan 37,97 % dari penduduk Kabupaten Sinjai. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Sinjai telah diserahkan oleh Dinas Sosial kepada seluruh pemerintah desa dan kelurahan untuk menjadi dasar pengalokasian program bantuan sosial dan pemberdayaa ekonomi masyarakat.

Dalam rangka verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang prosesnya dimulai dari tingkat Pemerintah Desa dan Kelurahan. Adapun proses dan tata cara verifikasi dan validasi/perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah:

1. Proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimulai dari di tingkat desa/kelurahan.
2. Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap keluarga yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dianggap dan dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada, meninggal dunia, pindah alamat ke luar kabupaten sinjai yang kesemuanya sudah perlu dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pengamatan dan pencacatan terhadap keluarga yang ada di Desa/Kelurahan yang dianggap perlu diusulkan untuk masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
4. Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan musyawarah desa/kelurahan untuk menetapkan daftar keluarga yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dinilai perlu dikeluarkan dari DTKS dan Keluarga yang dinilai perlu diusulkan masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
5. Setelah dilakukan musyawarah desa/kelurahan, petugas pendata yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa/kelurahan turun kelapangan mengunjungi masing-masing keluarga yang sudah ditetapkan untuk diverifikasi dan divalidasi dengan melakukan pengisian formulir penilaian yang dikeluarkan oleh Pusdatin kemensos sebagaimana terlampir.

6. Setelah pengisian formulir penilaian oleh petugas pendata yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa/kelurahan selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial dengan melampirkan :
 - a. Berita acara Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan (dan Lampirannya)
 - b. Kartu Keluarga.
 - c. Form Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi terkait Perubahan/Penghapusan/ Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
7. Setelah usulan dari desa dan kelurahan diterima oleh Dinas Sosial maka selanjutnya Dinas Sosial menginput satu persatu data dari formulir data ke dalam Sistem aplikasi SIKS-NG yang terkoneksi dengan Pusdatin Kemensos dan melampirkan bukti Hasil Musyawarah desa/kelurahan.
8. Selanjutnya data diolah oleh Pusdatin Kemensos melalui Metode Proxy- Mean Testing (PMT). Hasil Proxy – Mean Testing akan menentukan tingkatan rangking status sosial ekonomi keluarga yang diusulkan. Dengan tingkatan rangking tersebut menentukan apakah keluarga yang diusulkan untuk dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) benar adanya sudah bisa keluar dari pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tidak. Demikian pula bagi keluarga yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) apakah benar adanya untuk bisa masuk dalam pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tidak.
9. Hasil Finalisasi pengolahan data oleh PUSDATIN selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial sebagai Data Terpadu Kesejahteraan sosial terbaru yang dimungkinkan dilakukan 2 kali dalam setahun.

Pada dasarnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah bukan merupakan data kemiskinan di suatu daerah tetapi merupakan data yang menunjukkan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat mulai dari yang terendah .

Keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sangat ditentukan oleh dedikasi petugas pendata dan kejujuran keluarga yang didata dalam mengungkapkan

atau memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonominya sebagaimana yang dipertanyakan dalam formulir pendataan.

Khusus mengenai data dan informasi yang terkait dengan angka kemiskinan di suatu daerah masih tetap menjadi kewenangan sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik sesuai dengan indikator yang ditetapkan dan dipergunakan oleh Badan Pusat Statistik.

Gambar 2.2 Gambar formulir Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

2.10. Pandemi Virus corona Covid - 19

Virus Corona atau dalam sebutan ilmiahnya disebut sebagai Covid-19. Virus corona mulai merebak disekitar wilayah Wuhan dan kini telah menjangkiti lebih dari 100 negara. Sebanyak lebih dari 100.000 orang di dunia dinyatakan positif terinfeksi virus ganas ini. Jumlah kasus baru yang dilaporkan di China memang menurun. Namun lonjakan kasus justru terjadi di Korea Selatan, Italia dan Iran. Semakin meluasnya wabah corona ke berbagai belahan dunia menjadi ancaman serius bagi perekonomian global. "Penyebaran COVID-19 yang semakin meluas akan memperlama periode

jatuhnya perekonomian Asia Pasifik. Australia, Hong Kong, Singapura, Jepang, Korea Selatan dan Thailand diprediksi terancam terseret ke dalam jurang resesi, menurut S&P.

Selain itu perkiraan pertumbuhan ekonomi China untuk 2020 dari 5,7% diprediksi turun menjadi 4,8%. Negara yang perekonomiannya akan sangat terkena imbasnya adalah Hong Kong, Singapura, Thailand dan Vietnam mengingat sektor pariwisata menyumbang hampir 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. "Pelancong dari China berkontribusi besar terhadap total turis asing di negara tersebut. Masalahnya virus ini pertama kali menyerang China yang notabene merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dan juga sebagai negara yang menyandang status "*global manufacturing hub*" (5 Ngerinya Ramalan S&P Soal Corona ke Ekonomi, RI Bisa Selamat - Halaman 2, n.d. 2020). Virus Corona kemudian muncul dan memberikan begitu banyak pengaruh dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak dan begitu terasa adalah sektor ekonomi.

2.11. *Structure System Analyst and Design Method (SSADM)*

Systems Analysis and Design Methods (SADM) adalah suatu pendekatan untuk menganalisa dan merancang suatu sistem informasi. Pendekatan ini dulunya dihasilkan untuk Central Computer and Telecommunication Agency (sekarang bernama Office of Government Commerce), sebuah kantor pemerintahan Inggris yang bergerak di bidang penggunaan teknologi dalam pemerintahan, dari tahun 1980 sampai sekarang. (Structured Systems Analysis and Design Method, 2009) Tiga teknik penting yang digunakan dalam SADM ini yaitu:

a) Logical Data Modeling

yaitu proses pengidentifikasian, pemodelan, dan dokumentasi data yang dibutuhkan dari sistem yang akan didisain. Data-data tersebut dipisahkan dalam entities dan relationship;

b) Data Flow Modeling

yaitu proses pengidentifikasian, pemodelan, dan dokumentasi bagaimana data bergerak pada suatu sistem informasi. Data flow modelling membahas proses (aktifitas yang mentransformasi data dari satu bentuk ke bentuk lain),

menyimpan data, external entities (mengirim data ke dalam sistem atau menerima data dari suatu sistem), dan aliran data (rute tempat aliran data);

c) Entity Behavior Modeling

yaitu proses pengidentifikasian, pemodelan dan dokumentasi kejadian-kejadian yang mempengaruhi masing-masing entity, dan urutan kejadian ini berlangsung.

2.12. Roadmap Penelitian

Road map penelitian yang sudah dilakukan selama ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Road Map Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan
			Sumber
1.	2020	Rancang Bangun Prototipe Trainer Robot Scara Sebagai Media Pembelajaran Pada Mata Kuliah Robotika	UNAS
2.	2020	Prototipe Robot Manipulator Sendi Lengan (<i>Joint - Arm</i>) Berbasis Arduino Uno Pada Sistem Pemilah Barang	Mandiri
	2019	Sistem Otomasi Pengaturan Ketinggian Permukaan Air Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Aplikasi BLYNK"	Mandiri
4.	2019	Perancangan Mobile Robot Obstacle Avoiding Berbasis Sensor Ultrasonic Range Finder Parallax dan LabView"	Mandiri
5.	2018	Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Dana Alokasi Khusus (DAK) Rumah Swadaya dengan Menggunakan Total Architecture".	Mandiri
6	2018	Perancangan Aplikasi Sistem Navigasi Autonomous Guided Vehicle (AGV) Berbasis Arduino Uno dan Labview"	Mandiri
7.	2017	Rancang Bangun Sistem Pengamatan Cuaca dengan menggunakan Media Komunikasi Wireless NRF24I01	Mandiri
8.	2016	Rancang Bangun sistem Informasi Administrasi	Mandiri

		Persuratan dengan menggunakan Total Architecture	
9.	2015	Implementasi Algoritma Cipher Block Untuk Keamanan Data Biometrik E-KTP dengan Menggunakan Duffing - Map	UNAS
10.	2015	Model sistem Dinamika penyediaan dan Pendistribusian bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah berbasis kepulauan	Mandiri
11.	2016	Rancang Bangun Sistem Deteksi Dini Bencana Tanah Longsor Berbasis Sensor <i>MicroElectroMechanical Systems (MEMS)</i>	HIBER
12.	2015	Rancang Bangun Sistem Deteksi Dini Bencana Tanah Longsor Berbasis Sensor <i>MicroElectroMechanical Systems (MEMS)</i>	UNAS
13.	2014	Perancangan Sistem Instrumentasi Pengamatan Cuaca Otomatis Saluran Ganda Berkapasitas Tinggi Dan Hemat Energi	HIBER
14.	2013	Perancangan Sistem Instrumentasi Pengamatan Cuaca Otomatis Saluran Ganda Berkapasitas Tinggi Dan Hemat Energi	UNAS

BAB 3. METODE PENELITIAN

Tahapan *The Structure System Analysisist and Design Method* (SSADM). *The Structure System Analysisist and Design Method* (SSADM) digunakan dalam pengembangan sistem, tetapi tidak mencakup siklus hidup seluruh sistem. Berikut merupakan gambaran dari *The Structure System Analysisist and Design Method* (SSADM) dan siklus hidup pengembangan sistem. Antara lain :

1. *Fisibility Study*

Tahapan untuk mempelajari proyek yang akan dikerjakan/ dibangun apakah layak untuk dilaksanakan atau tidak. Dengan memperhatikan berbagai aspek seperti finansial, sosial dan aspek sistem itu sendiri apakah akan diterima oleh organisasi atau tidak.

2. *Requirement Analysisist*

Pada tahap ini terbagi menjadi dua *stage*, yaitu :

Stage 1 : Investigation of Current Environment

Tahap ini dilakukan observasi, wawancara dan penyebaran quisioner guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan sistem. Tahap ini juga bertujuan untuk melakukan analisis pada sistem yang sebelumnya yang dilihat dari prosedur, dokumen dan aktifitas sehingga akan diketahui apa yang harus diperbaiki pada sistem sebelumnya.

Stage 2 : Business System Options

Pada tahap sebelumnya, yakni melakukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan (*current system*), maka pada tahap ini akan menetapkan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang musti ada dan yang akan dipilih untuk diterapkan pada sistem yang baru.

3. *Requirement Spesification*

Berdasarkan pilihan sistem bisnis yang dipilih, perincian spesifikasi dari sistem yang diperlukan adalah menyusun daftar kebutuhan yang telah ditetapkan dengan lebih detail. Hal tersebut dilakukan guna dalam perancangan maupun

implementasi sistem informasi data yang diperlukan akurat dan sesuai dengan perhitungan.

4. *Logical System Specification*

Pada tahap *logical system specification* terdapat 2 stage, yaitu:

Stage 1 : Selection of Technical Options

Tahapan yang mendekati implementasi secara fisik atas sistem baru. Pada tahap ini membahas beberapa pilihan untuk implementasi sistem baru. Kemudian mempertimbangkan arsitektur perangkat keras, perangkat lunak, biaya pelaksanaan proyek dan pegawai yang diperlukan.

Stage 2 : Logical Design

Spesifikasi yang dikembangkan pada tahap sebelumnya diperluas pada tingkat yang sangat tinggi dan detail sehingga konstruktor dapat diberikan semua detail yang diperlukan untuk membangun sistem.

5. *Physical Design*

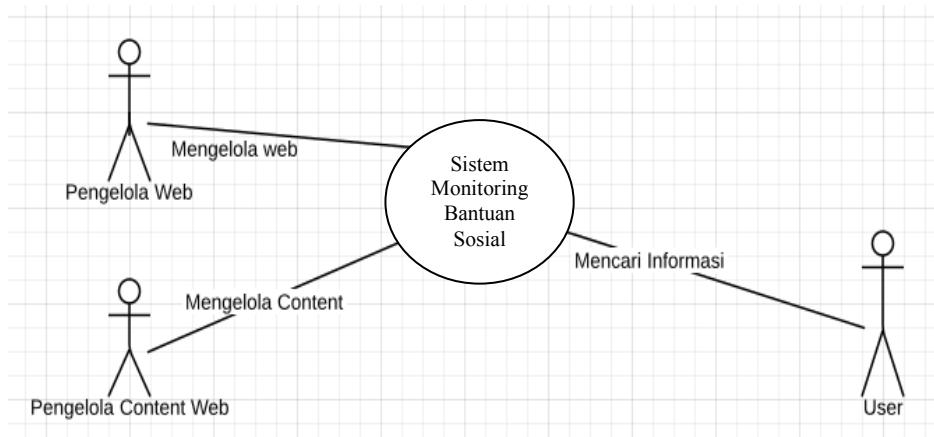
Pada tahap ini memperhatikan secara lengkap logis yang dibuat dan pengolahan diubah menjadi desain yang akan berjalan pada lingkungan target. Desain fisik yang diatur sebelum pelaksanaan dimulai sehingga akan memenuhi persyaratan kinerja sistem sesuai standar yang dibuat

3. 1. Instrument Penelitian.

Metode perancangan system yang digunakan adalah ***Unified Modelling Language*** (UML), yang ditampilkan dalam perancangan UML ini hanya *Use Case* dan Paket diagram.

a. *Use Case Diagram*

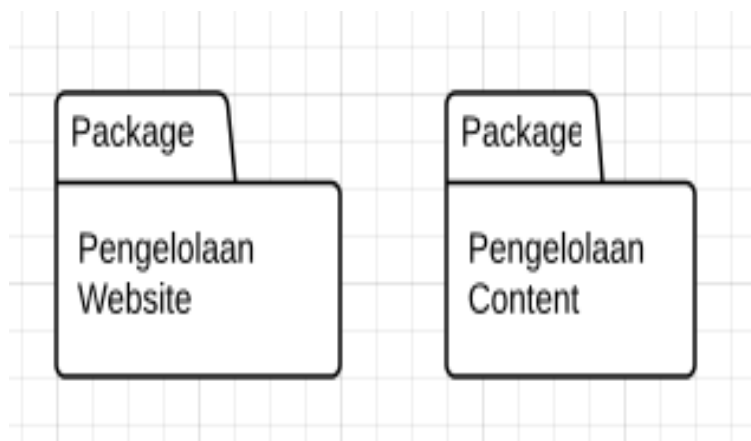
Sebuah skenario adalah sebuah urutan dari langkah-langkah yang menjelaskan sebuah interaksi antara seorang pengguna dan sebuah system. Sebuah *use case* adalah sekumpulan skenario yang saling terikat untuk mencapai tujuan dari pengguna. Sebuah *actor* adalah sebuah peran yang dijalankan oleh pengguna ketika berinteraksi dengan system. Sebuah actor dapat melakukan lebih dari satu use case.



Gambar 3.1. Use case diagram

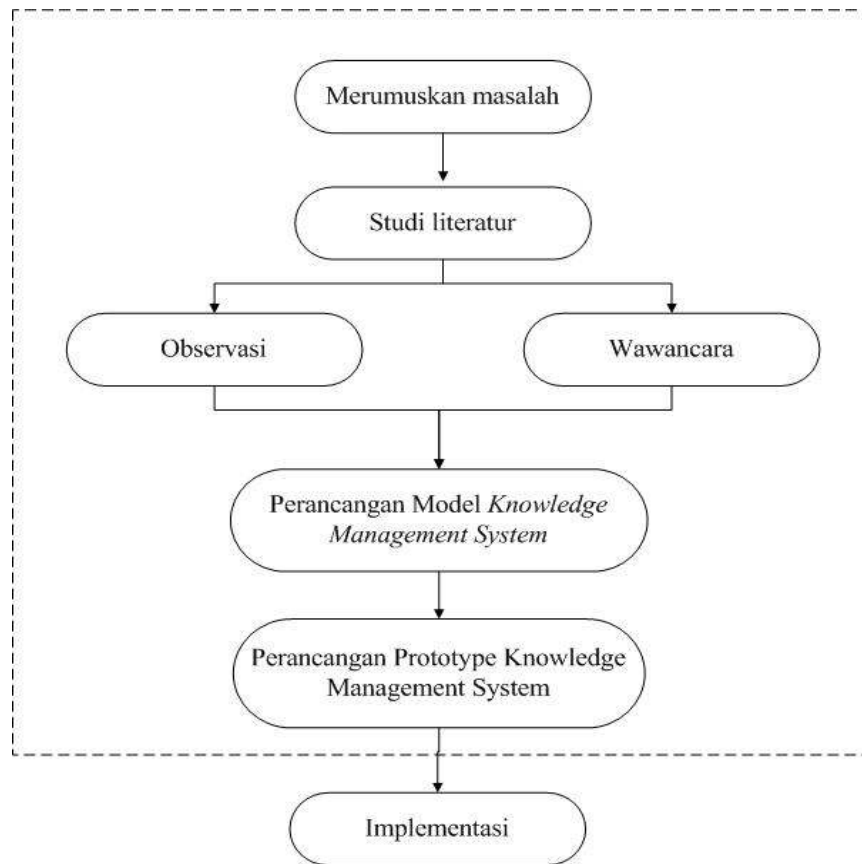
b. Paket Diagram

Sebuah Paket Diagram menjelaskan paket dari objek dalam sebuah system dan berbagai jenis hubungan yang terdapat diantara objek-objek tersebut.



Gambar 3.2. Paket Diagram

3.2. Alur Pikir Penelitian.



Gambar 3.2 Alur pikir perancangan model

Pada gambar 3.2 terlihat bahwa alur pikir penelitian dimulai dengan merumuskan masalah berdasarkan wawancara via whatsapp dan zoom, setelah itu dilanjutkan dengan melakukan studi literatur terkait dengan masalah yang diambil. Tahapan berikutnya adalah mengumpulkan data yang diperoleh melalui review dokumen, observasi, dan wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis sehingga terbentuk model sistem monitoring bantuan sosial. Setelah didapatkan model untuk sistem monitoring bantuan sosial kemudian model tersebut digunakan untuk merancang prototype sistem monitoring bantuan sosial.

3.3 Kesimpulan Sementara

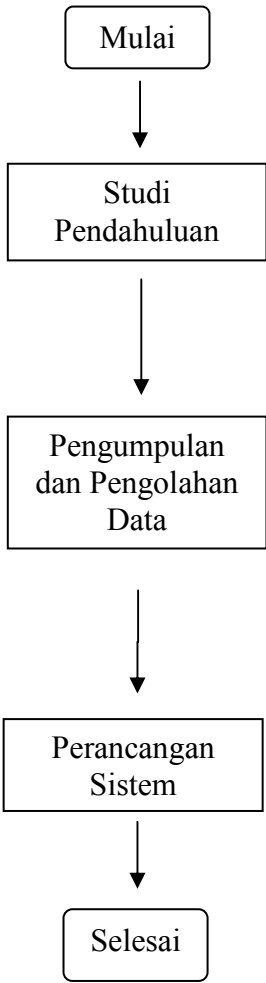
Berdasarkan analisis yang dilakukan, secara keseluruhan sistem yang ada dinilai telah cukup baik karena telah memiliki standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa aktifitas kegiatan pendataan dan monitoring yang kurang dilakukan oleh pihak pelaksana penyaluran bantuan sosial. Berikut ini merupakan kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan pada sistem yang berjalan pada saat ini.

- 1) Dari analisis yang telah dilakukan dalam penyaluran bantuan sosial, tidak ada proses yang menunjukkan aktifitas yang dilakukan oleh pihak pelaksana penyaluran bantuan sosial melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan sosial.
- 2) Verifikasi data calon penerima bantuan sosial dan area layak dibantu masih dilakukan secara manual dan rentan untuk memperoleh data yang usang (*tidak up to date*).
- 3) Perlu ada proses yang dapat memverifikasi data sebelum masuk kedalam tahap seleksi kegiatan.
- 4) Perlu ada proses yang dapat yang dapat memonitoring kegiatan seperti evaluasi kegiatan guna memantau kegiatan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.

BAB 4. PERANCANGAN DAN IMPELENTASI

4.1 Tahapan Perancangan Sistem

Tahapan perancangan Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial dapat digambarkan sebagai berikut :

Diagram Alir	Indikator Pencapaian	Hasil
 <pre>graph TD; A[Mulai] --> B[Studi Pendahuluan]; B --> C[Pengumpulan dan Pengolahan Data]; C --> D[Perancangan Sistem]; D --> E[Selesai];</pre>	<p>Pengumpulan informasi</p> <p>Pemodelan sistem yang sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Rancangan Database, User Interface dan Program Aplikasi sesuai dengan kebutuhan</p>	<p>Informasi Bantuan Sosial</p> <p>Pemodelan sistem</p> <p>Desain atau Rancangan Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial</p>

Gambar 4.1 Tahapan perancangan sistem

Tahapan perancangan Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu :

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan observasi dan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada sebagai landasan dalam tahap selanjutnya.

b. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data penerima bantuan sosial yang diterima oleh keluarga penerima manfaat, kemudian dilakukan pembuatan pemodelan sistem untuk mengetahui secara jelas proses aliran data yang terjadi. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap pemodelan yang telah dibuat. Analisis sistem ini menghasilkan daftar kebutuhan sistem yang akan digunakan sebagai acuan dalam perancangan sistem.

c. Perancangan Sistem

Tahapan perancangan sistem ini terdiri dari tiga tahapan yaitu tahapan perancangan database, tahapan perancangan user interface dan tahapan perancangan program aplikasi.

4.2 Tahapan Implementasi

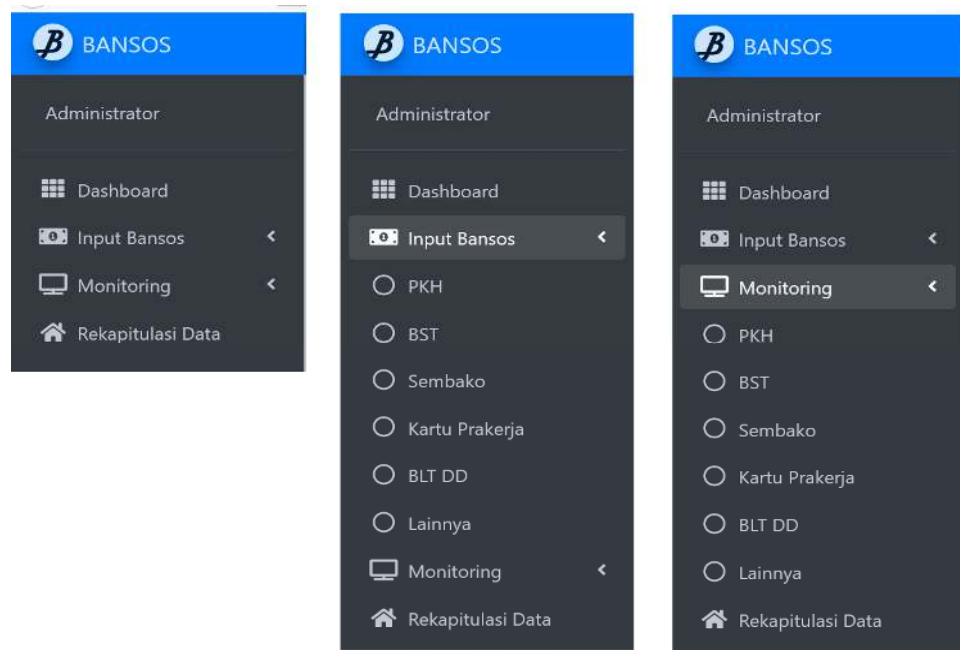
Tahapan selanjutnya adalah membuat aplikasi Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial berdasarkan desain atau rancangan yang sudah dibuat. Aplikasi Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial dibuat berbasis web.

Pada Aplikasi Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial ini terdapat beberapa menu - menu yang dapat dilihat pada gambar 4.2. Empat Menu utama pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial yaitu :

a. Dashborad

Pada menu dashboard terdapat User Interface yang menampilkan berbagai metriks, angka ataupun visualisasi data yang dapat digunakan oleh user untuk

membuat dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat berdasarkan data yang ditampilkan



Gambar 4.2 Daftar menu Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial

b. Input Data

Menu yang digunakan untuk menginput data penerima bantuan sosial pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial.

c. Monitoring

Menu yang digunakan untuk melakukan monitoring proses penyaluran bantuan sosial pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial.

d. Rekapitulasi Data.

Menu yang berisi data rekapitulasi daftar penerima bantuan sosial berdasarkan jenis bantuan yang diterima.

Pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial ini program bantuan sosial yang akan direcord adalah program bantuan sosial khusus untuk yang yang diberikan

untuk yang terdampak karena dampak COVID-19. Program Bantuan sosial yang disalurkan mencakup beberapa program bantuan sosial seperti :

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH

b. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

c. Bantuan Sosial Sembako

Bantuan Sosial Sembako adalah bantuan sosial berupa sembako dan beras yang didistribusikan bagi masyarakat terdampak pandemi

d. Kartu Prakerja

Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

e. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

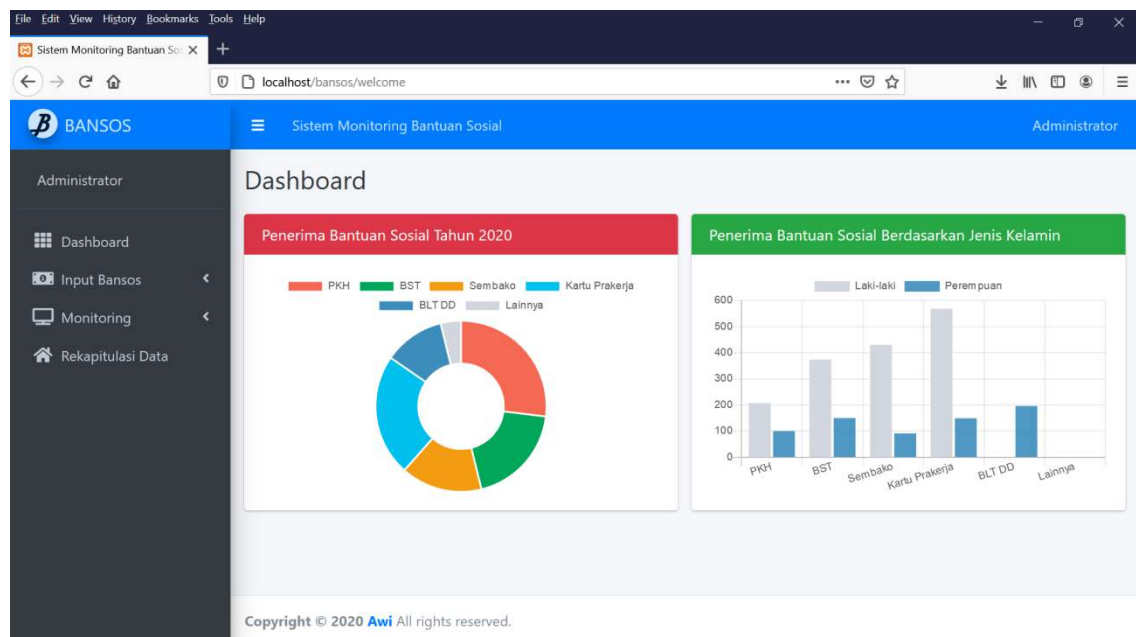
BLT DD adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19.

f. Lainnya

Bantuan Sosial dalam rangka dampak pandemi covid-19 selain bantuan PKH, BST, Sembako, Kartu Prakerja dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Tampilan awal dari Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial adalah Dashboard yang berisi gambar grafik penerima bantuan sosial berdasarkan dari jumlah total penerima bantuan sosial dari beberapa jenis program bantuan sosial yang ada dan berdasarkan kriteria jumlah total jenis kelamin penerima bantuan sosial. Informasi jumlah total penerima bantuan sosial dari beberapa jenis program bantuan sosial yang ada dan berdasarkan kriteria jumlah total jenis kelamin penerima bantuan sosial ini sangat penting agar pengambil kebijakan sebagai pelaksana penyaluran bantuan sosial dapat

mengetahui komposisi dari jumlah keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis program bantuan sosial, sehingga berdasarkan informasi diatas dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penentuan penerima manfaat yang tepat sasaran. Tampilan Dashboard Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial dapat dilihat pada gambar yang tampak dibawah ini.

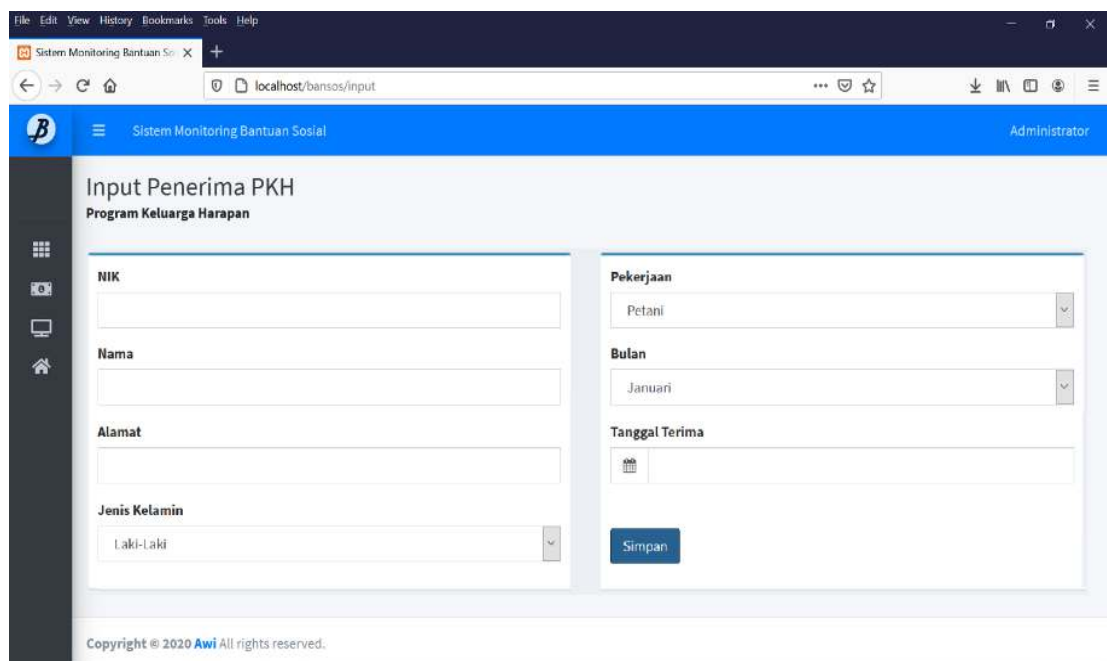


Gambar 4.3 Dashboard Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial

Informasi yang di tampilan pada Dashboard Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial berasal dari data penerima manfaat yang diinput menggunakan menu yang Input Bansos. Menu Input Bansos digunakan untuk memasukkan data penerima program bantuan sosial sesuai jenis bantuan yang didapatkan. Data yang diinput adalah data *By Name By Address* dari keluarga penerima manfaat sehingga kalau terjadi data ganda keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial lebih dari satu akan dengan mudah dapat diketahui.

Menu pertama dari Input Bansos adalah Menu Input Program keluarga Harapan (PKH) yaitu menu yang digunakan untuk menginput semua data keluarga penerima

manfaat yang mendapatkan bantuan sosial Program keluarga Harapan (PKH). Data yang dimasukkan adalah data NIK, Nama, Alamat, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Bulan menerima Bantuan dan tanggal menerima bantuan. Bulan disini diperlukan karena skema pemberian bantuan Program keluarga Harapan (PKH) berdasarkan hitungan bulan atau per bulan, sehingga catatan data keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan berapa bulan dapat dengan mudah diketahui. Tampilan menu input data Program keluarga Harapan (PKH) tampak pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.4 Menu Input Bansos Program keluarga Harapan (PKH) pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial

Menu Input Bansos yang kedua adalah Menu Input Bantuan Sosial Tunai (BST). yaitu menu yang digunakan untuk menginput semua data keluarga penerima manfaat yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST). Data yang dimasukkan adalah data NIK, Nama, Alamat, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Bulan menerima Bantuan dan tanggal menerima bantuan. Skema pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) juga dihitung

berdasarkan bulan atau per bulan, sehingga catatan data keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan berapa bulan dapat dengan mudah diketahui. Tampilan menu input data Bantuan Sosial Tunai (BST) tampak pada gambar 4.5.

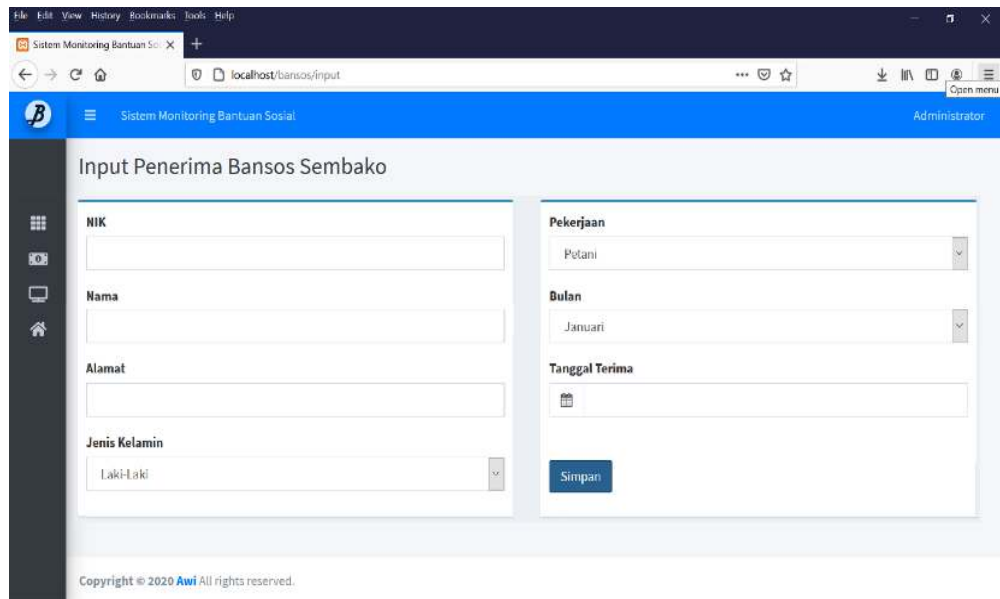
The screenshot shows a web browser window with the URL 'localhost/bansos/input'. The page title is 'Sistem Monitoring Bantuan Sosial' and the user is logged in as 'Administrator'. The main content area is titled 'Input Penerima BST' and 'Bantuan Sosial Tunai'. The form includes the following fields:

- NIK:
- Nama:
- Alamat:
- Jenis Kelamin:
- Pekerjaan:
- Bulan:
- Tanggal Terima:

A blue 'Simpan' button is positioned below the 'Tanggal Terima' field. At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © 2020 Awi All rights reserved.'

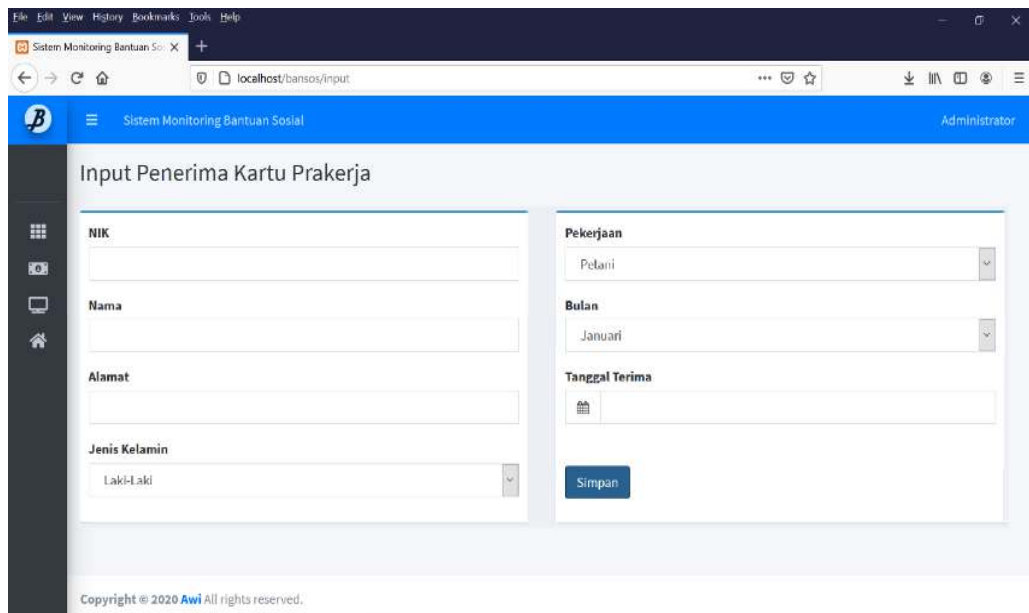
Gambar 4.5 Tampilan menu input data Bantuan Sosial Tunai (BST) Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial

Menu Input Bansos yang ketiga adalah Menu Input Bansos Sembako yaitu menu yang digunakan untuk menginput semua data keluarga penerima manfaat yang mendapatkan Bantuan Sosial Sembako. Data yang dimasukkan adalah data NIK, Nama, Alamat, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Bulan menerima Bantuan dan tanggal menerima bantuan. Skema pemberian Bansos Sembako juga dihitung berdasarkan bulan atau per bulan, sehingga catatan data keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan berapa bulan dapat dengan mudah diketahui. Tampilan menu input data Bansos Sembako tampak pada gambar 4.6.



Gambar 4.6. Tampilan menu input data Bansos Sembako pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial

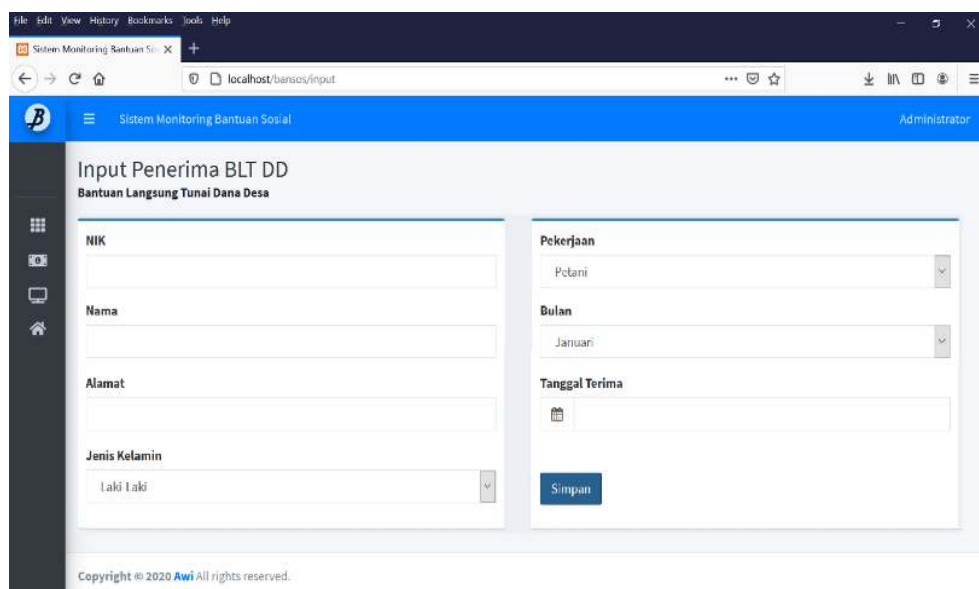
Menu Input Bansos yang keempat adalah Menu Input Bantuan Kartu Prakerja yaitu menu yang digunakan untuk menginput data penerima Kartu Prakerja.



Gambar 4. Tampilan Menu Input Bantuan Kartu Prakerja Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial

Data yang dimasukkan adalah data NIK, Nama, Alamat, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Bulan menerima Bantuan dan tanggal menerima bantuan. Tampilan menu input data Kartu Prakerja tampak pada gambar 4.7.

Menu Input Bansos yang kelima adalah Menu Input Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yaitu menu yang digunakan untuk menginput semua data keluarga penerima manfaat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Data yang dimasukkan adalah data NIK, Nama, Alamat, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Bulan menerima Bantuan dan tanggal menerima bantuan.

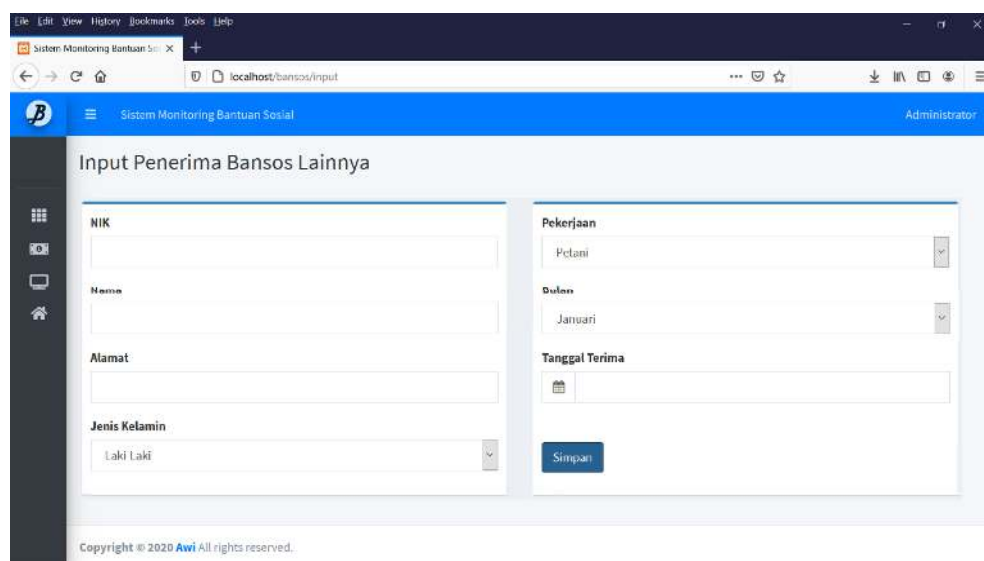


The screenshot shows a web browser window with the URL localhost/bansos/input. The page title is 'Sistem Monitoring Bantuan Sosial' and the user is logged in as 'Administrator'. The main heading is 'Input Penerima BLT DD' with the subtitle 'Bantuan Langsung Tunai Dana Desa'. The form contains the following fields: NIK (text input), Nama (text input), Alamat (text input), Jenis Kelamin (dropdown menu with 'laki laki' selected), Pekerjaan (dropdown menu with 'Petani' selected), Bulan (dropdown menu with 'Januari' selected), and Tanggal Terima (calendar icon). A blue 'Simpan' button is located at the bottom right of the form. The footer of the page reads 'Copyright © 2020 Awi All rights reserved.'

Gambar 4.8 Tampilan Menu Input Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial

Skema pemberian bantuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dihitung berdasarkan bulan atau per bulan, sehingga catatan data keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan berapa bulan dapat dengan mudah diketahui. Tampilan menu input data Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tampak pada gambar 4.8.

Menu Input Bansos yang keenam adalah Menu Input Bansos Lainnya yaitu menu yang digunakan untuk menginput semua data keluarga penerima manfaat yang mendapatkan Bantuan Sosial selain PKH, BST, Sembako, Kartu Prakerja dan BLT DD. Data yang dimasukkan adalah data NIK, Nama, Alamat, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Bulan menerima Bantuan dan tanggal menerima bantuan. Tampilan menu input data penerima bantuan sosial lainnya tampak pada gambar 4.9.



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/bansos/input`. The page title is "Sistem Monitoring Bantuan Sosial" and the user is logged in as "Administrator". The main heading is "Input Penerima Bansos Lainnya". The form includes the following fields:

- NIK:
- Nama:
- Alamat:
- Jenis Kelamin:
- Pekerjaan:
- Bulan:
- Tanggal Terima:

A "Simpan" button is positioned below the form fields. At the bottom of the page, there is a copyright notice: "Copyright © 2020 Awi All rights reserved."

Gambar 4.9 Tampilan Menu Input Bansos Lainnya pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial

Menu Monitoring adalah menu yang digunakan untuk monitoring proses penyaluran bantuan sosial. Dengan menggunakan menu ini bisa diketahui apakah penyaluran bantuan sosial tepat waktu atau tidak. Dengan menggunakan menu ini juga bisa diketahui apakah ada keluarga penerima yang terlewat belum menerima bantuan atau tidak.

Tampilan menu monitoring data Program keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat seperti pada gambar 4.10. Pada menu ini ditampilkan semua data penerima Program keluarga Harapan (PKH). Dari menu ini bisa dilakukan monitoring terhadap proses

penyaluran data Program keluarga Harapan (PKH) untuk semua penerima bantuan. Data berasal dari data yang diinput pada menu input data Program keluarga Harapan (PKH).

NIK	Nama	Alamat	Bulan														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3271046504930001	Abdul Kadir	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓										
3271046504930002	Abu Naim	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓										
3271046504930003	Ahsan umar	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓										
3271046504930004	Burhanudin	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
3271046504930005	Fadli Ali	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓										
3271046504930006	Fatimah Zahra	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓										
3271046504930007	Halimi Naka	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓										

Gambar 4.10 Tampilan menu Monitoring Data Program keluarga Harapan (PKH) pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial

Tampilan menu monitoring data Bantuan Sosial Tunai (BST) tampak pada gambar 4.11.

NIK	Nama	Alamat	Bulan														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3271046504930008	HALIMAN	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓											
3271046504930009	HAMBALI	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓											
3271046504930010	BUDIMAN	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓											
3271046504930011	NURADI	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓											
3271046504930012	FATHONAH	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓											
3271046504930013	BAROKAH	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓											
3271046504930014	SUPRI	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓											

Gambar 4.11 Tampilan menu Monitoring Data Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial

Pada menu ini ditampilkan semua data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Dari menu ini bisa dilakukan monitoring terhadap proses penyaluran data Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk semua penerima bantuan. Data berasal dari data yang diinput pada menu input data Bantuan Sosial Tunai (BST).

Tampilan menu monitoring data bantuan sosial sembako tampak pada gambar 4.12. Pada menu ini ditampilkan semua data penerima bantuan sosial sembako. Dari menu ini bisa dilakukan monitoring terhadap proses penyaluran data bantuan sosial sembako untuk semua penerima bantuan. Data berasal dari data yang diinput pada menu input data Sembako.

NIK	Nama	Alamat	Bulan													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3271046504930008	NGADIMAN	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3271046504930009	SUTRISMAN	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3271046504930010	BUDI KURNIADI	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓										
3271046504930011	SAPRUDIN	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓										
3271046504930012	WARJI	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3271046504930013	SRI REJEKI	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
3271046504930014	ANTON	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓										

Gambar 4.12 Tampilan menu Monitoring Data penerima bantuan sosial sembako pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial

Tampilan menu monitoring data Kartu Prakerja tampak pada gambar 4.13. Pada menu ini ditampilkan semua data penerima Kartu Prakerja. Dari menu ini bisa dilakukan monitoring terhadap proses penyaluran data bantuan kartu prakerja untuk semua penerima bantuan. Data berasal dari data yang diinput pada menu input data Kartu Prakerja.

NIK	Nama	Alamat	Bulan													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3271046504930008	SULAIMAN	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3271046504930009	KURNIAWAN	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3271046504930010	AIMAN	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3271046504930011	SUSILOWATI	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3271046504930012	NOVITA	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3271046504930013	PURNOMO	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3271046504930014	KARTIKA	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Gambar 4.13 Tampilan menu Monitoring Data penerima bantuan sosial Kartu Prakerja pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial

Tampilan menu monitoring data Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tampak gambar 4.14.

NIK	Nama	Alamat	Bulan													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3271046504930008	SUPIAH	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3271046504930009	SULASTRI	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
3271046504930010	QOYIMAH	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
3271046504930011	HANIK	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
3271046504930012	BAMBANG	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3271046504930013	SUPARTI	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3271046504930014	NURUL	ALUE BAGOK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							

Gambar 4.14 Tampilan menu Monitoring Data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial

Pada menu ini ditampilkan semua data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Dari menu ini bisa dilakukan monitoring terhadap proses penyaluran data Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk semua penerima bantuan. Data berasal dari data yang diinput pada menu input data Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Tampilan menu monitoring data bantuan sosial lainnya tampak pada gambar 4.15. Pada menu ini ditampilkan semua data penerima bantuan sosial lainnya. Dari menu ini bisa dilakukan monitoring terhadap proses penyaluran data bantuan sosial lainnya untuk semua penerima bantuan. Data berasal dari data yang diinput pada menu input data bantuan sosial lainnya.

NIK	Nama	Alamat	Bulan													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3271046504930008	BUDI SUSILO	ALUE BAGOK	✓	✓												
3271046504930009	ROHIMAH	ALUE BAGOK	✓	✓												
3271046504930010	FATIMAH	ALUE BAGOK	✓	✓												
3271046504930011	MUNAWAROH	ALUE BAGOK	✓	✓												
3271046504930012	WENDI	ALUE BAGOK	✓	✓												
3271046504930013	WIDYAWATI	ALUE BAGOK	✓	✓												
3271046504930014	SAIPUL	ALUE BAGOK	✓	✓												

Gambar 4.15 Tampilan menu Monitoring Data penerima Bantuan Sosial lainnya pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial

Untuk mengetahui semua data keluarga penerima manfaat dari program bantuan sosial yang diterapkan pemerintah sebagai akibat pandemi covid-19 dapat dilihat pada menu rekapitulasi bansos. Tampilan menu rekapitulasi bantuan sosial tampak pada gambar 4.16.

NIK	NAMA	ALAMAT	JENIS BANSOS						
			PKH	BST	SEMBAKO	PRAKERJA	BLT DD	LAINNYA	
3271046504930008	BUDI SUSILO	ALUE BAGOK	✓						
3271046504930014	SAIPUL	ALUE BAGOK	✓						
3271046504930009	ROHIMAH	ALUE BAGOK		✓					
3271046504930010	FATIMAH	ALUE BAGOK			✓				
3271046504930011	MUNAWAROH	ALUE BAGOK				✓			
3271046504930012	WENDI	ALUE BAGOK					✓		
3271046504930013	WIDYAWATI	ALUE BAGOK						✓	

Gambar 4.16 Tampilan menu rekapitulasi bantuan sosial pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial

Dengan menggunakan Tampilan menu rekapitulasi bantuan sosial pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial ini bisa dilakukan monitoring terhadap semua data penerima bantuan. Pada Tampilan menu rekapitulasi bantuan sosial ini dapat diketahui apakah penerima bantuan tersebut menerima bantuan lebih dari satu, sehingga diharapkan bantuan sosial menjadi lebih transparant, tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

Monitoring bisa dilakukan untuk semua jenis program bantuan sosial karena pada Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial ini terintegrasi semua data jenis bantuan sosial yang ada. Dengan Sistem Aplikasi Monitoring Bantuan Sosial ini diharapkan tidak ada warga yang sangat membutuhkan bantuan yang tertinggal tidak menerima bantuan (*no one left behind*).

BAB 5. KESIMPULAN

1. Dengan aplikasi monitoring bantuan sosial ini pengelolaan dan monitoring data penerima bantuan sosial menjadi lebih mudah dan efektif.
2. Memberikan kemudahan dalam akses informasi terkait monitoring proses penyaluran bantuan sosial.
3. Proses monitoring terhadap penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan sehingga penyaluran bantuan sosial dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
4. Monitoring bisa dilakukan untuk semua jenis program bantuan sosial karena pada aplikasi ini terintegrasi semua data jenis bantuan sosial yang ada. Dengan aplikasi ini diharapkan tidak ada warga yang sangat membutuhkan bantuan yang tertinggal tidak menerima bantuan (*no one left behind*).

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Triyono. (2017). Penyaluran bantuan sosial kurang efektif*). Retrieved October 29, 2019, from <https://nasional.kontan.co.id/news/penyaluran-bantuan-sosial-salah-sasaran>
- Anam, A., Winarno, W. W., & Ferdiana, R. (2016). Perancangan Aplikasi Informasi Prosedur Pelayanan Publik Berbasis USSD (*Unstructured Supplementary Service Data*). Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2016, (Snik), 177–183.
- Azhar Susanto. 2004. Sistem Informasi Manajemen konsep dan pengembangannya. Lingga Jaya. Bandung.
- Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).
- Emerson Yuntho. (2013). Dana Bantuan Koruptor | JDIH Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Retrieved October 29, 2019, from <http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=berita/dana-bantuan-koruptor>
- Fitriyani, N. (2011). Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Berbasis Web (Studi Kasus : Yayasan Pesantren Tarbiyah Nurul Ma ' Arif Serang Banten) Disusun oleh : Nurul Fitriyani Program Studi Sistem Informasi 2011 M / 1432H. Jakarta. Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3114/1/Nurul Fitriyani FST.pdf>
- HM, Jogiyanto. (2009). Analisis dan Desain, Andi Offset, Yogyakarta.
- Ilman A. Sudarwan. (2018). Bantuan Sosial Non Tunai : Data Masih Jadi Kendala Penyaluran Bansos. Retrieved October 29, 2019, from <https://sumatra.bisnis.com/read/20180809/446/825931/bantuan-sosial-nontunai-data-masih-jadi-kendala-penyaluran-bansos>
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
- Kamaruddin Tone. (2016). Untuk perancangan proses digambarkan menggunakan DFD (, 1. Retrieved from journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/instek/article

- Khairul A, Bakir, Khoiriyah. 2017 “Perancang Sistem Informasi Monitoring Dana Desa Berbasis Web (Studi Kasus: Desa Sekecamatan Kadur)”. Seminar Nasional Humaniora & Aplikasi Sistem Informasi pp. 139.
- Kurniawan, B., Suryono, A., & Saleh, C. (2014). Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Garam Rakyat (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep). *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 17(3), 136–148. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2014.017.03.4>
- Lexy Moleong. 2016. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Maggalutung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Mirajuddin. 2019. Wawancara Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.
- Muhammad, husaini. (2018). Aplikasi Tranparansi Sumbangan Masyarakat Berbasis Web. Retrieved from https://www.academia.edu/36643591/Aplikasi_Transparansi_Sumbangan_Masyarakat_Berbasiss_Web
- Muhtar. (2018). *COMPLEMENTARY SOCIAL ASSISTANCE PROGRAMS AND BASIC NEEDS OF POOR* Abstrak PENDAHULUAN Menihilkan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas dari 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs), dimana Indonesia meru, 119–129.
- Pressman. 2015. *Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Praktisi* Buku I. Yogyakarta: Andi.
- Purnia, D. S. (2018). Implementasi metode RAD pada Rancang Aplikasi BAN-SOS Terdistribusi Berbasis Mobile. *Jurnal IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, ISSN: 2527-449X , E-ISSN: 2549-7421, 3(1), 71–79. Retrieved from <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ijcit/article/view/3761>
- Putri Azizah H. 2017 “Efektifitas Penyaluran Dana Sosial”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rayadi. 2016 “Analisis Sistem Penyaluran Bantuan Ke Desa Pada Lingkungan Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Barat”. *Jurnal Eksos* 11(1) pp. 85.

Rita A, Shinta E, Yudi M. 2017 Membangun Sistem Inventory Data Barang (Studi Kasus : Apotek An-Nafi Sumbawa). Jurnal Tambora 2(2)pp. 95.

Rohmah, S.N. "Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Corona?," 'Adalah, Volume. 4, No. 1 (2020).

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).

<https://www.ui.ac.id/rektor-ui-memahami-dampak-lockdown-bagi-perekonomian-indonesia/ILC> (Indonesia Lawyers Club)

<https://www.worldometers.info/coronavirus/>

<https://www.worldcat.org/title/asia-news-monitor/oclc/767732004>

<https://www.bbc.com/indonesia/laporan-khusus-51221128>

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI



Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Bantuan Sosial dengan
Menggunakan Metodologi *Structure System Analysisist and Design Method*
(SDSADM)

Peneliti :

Agus Wibowo, ST., MT.

NIP. 0110090788

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS
UNIVERSITAS NASIONAL
2021

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Bantuan Sosial dengan Menggunakan Metodologi *Structure System Analysisist and Design Method* (SDSADM)

2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Agus Wibowo, ST., MT
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 17 April 1972
 - c. NIDN : 0317047202
 - d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - e. Pangkat/Golongan : III B
 - f. Jabatan Struktural : -
 - g. Fakultas/Prodi : Teknik dan Sains/Teknik Elektro
 - h. Alamat Rumah : Jl H. Taya No. 87 Gunuk IVb Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatabn
 - i. Nomor HP : 081316029876
 - j. Email : agg_wibi@yahoo.com
3. Usulan Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) bulan
4. Usulan Biaya : Rp. 10.300.000,-

Jakarta, 12 Febuari 2021

Mengetahui :

Ka.Prodi Teknik Elektro

Dosen Peneliti

Fuad Djauhari, ST, MT

NIP : 0312127501

Agus Wibowo,M.T

NIP : 0110090788

Menyetujui

Dekan Fakultas Teknik & Sains

Novi Azman, ST, MT

NIP : 0301050724